



EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN BAGI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN DESA BANJAREJO KABUPATEN MAGETAN

EFFECTIVENESS OF THE FAMILY HOPE PROGRAM FOR THE SOCIAL WELFARE OF THE POOR COMMUNITIES OF BANJAREJO VILLAGE, MAGETAN DISTRICT

Radheliya Artio Marta¹, Marita Ahdiyana²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 25-07-24

Diperbaiki 29-07-24

Disetujui 01-08-24

Kata Kunci:

Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan, kesejahteraan Sosial masyarakat

ABSTRAK

Indonesia salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Pertumbuhan penduduk yang cepat membawa berbagai tantangan dan peluang bagi pembangunan nasional, khususnya dalam konteks kemiskinan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai kesejahteraan sosial khususnya bagi penduduk miskin pedesaan dan tertinggal, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai program bantuan dan jaminan sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan bagi kesejahteraan sosial masyarakat miskin yang diselenggarakan di Desa Banjarejo, Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis data deskriptif dan interpretatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini berupa sumber data primer yakni observasi dan wawancara, serta sumber data sekunder yakni sumber tertulis berupa buku, artikel ilmiah, bahkan arsip, dokumen pribadi dan resmi. Seluruh informasi yang ada di dalam penelitian ini merupakan informasi yang sudah terpilih melalui pertimbangan agar mampu memberikan informasi yang akurat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas PKH belum sepenuhnya dikatakan efektif sesuai dengan indikator penilaian efektivitas karena masih ditemukan permasalahan pada indikator pemahaman program.

ABSTRACT

Keywords:

Effectiveness, Family Hope Program, Poverty, Social welfare of the community

Indonesia is one of the countries with the largest population in the world. Rapid population growth brings various challenges and opportunities for national development, especially in the context of poverty and social welfare of society. To overcome poverty and achieve social welfare, especially for poor rural and underdeveloped populations, the Indonesian Government carries out various social assistance and security programs, one of which is the Family Hope Program. The aim of this research is to find out how effective the Family Hope Program is for the social welfare of the poor which is held in Banjarejo Village, Magetan Regency. This research uses a qualitative descriptive method which focuses on descriptive and interpretative data analysis. The data sources used in this research are primary data sources, namely observations and interviews, as well as secondary data sources, namely written sources in the form of books, scientific articles, even archives, personal and official documents. All information contained in this research is information that has been selected through consideration in order to be able to provide accurate information. Data collection techniques in this research used observation, interviews and documentation techniques. From the results of the research it can be concluded that the effectiveness of PKH has not been fully said to be effective according to the indicators of evaluation of efficiency because there are still problems found on the indicator of program understanding.

1. Pendahuluan

Kemiskinan dapat diartikan tidak hanya sebagai kekurangan pendapatan, tetapi juga sebagai kekurangan kemampuan dasar (capabilities) untuk hidup yang layak [1]. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2023, angka kemiskinan sebesar 9.36% atau sekitar 25,90 juta penduduk miskin. Meskipun angka kemiskinan secara bertahap menurun yaitu 0,21% atau sekitar 0,25 juta penduduk pada periode September 2022, namun jumlah absolut individu yang hidup dalam kemiskinan masih signifikan khususnya bagi penduduk miskin daerah pedesaan dan tertinggal yaitu 14,16 juta penduduk [2].

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki populasi terbesar di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menduduki pada peringkat ketiga di Asia dan peringkat keempat di dunia sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak, pada sensus penduduk terakhir pada bulan Oktober 2023, populasi Indonesia mencapai sekitar 278,12 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini membawa berbagai tantangan dan peluang bagi pembangunan nasional, khususnya dalam konteks kemiskinan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Di satu sisi, populasi yang lebih besar dapat meningkatkan ukuran pasar domestik dan potensi tenaga kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, jika pertumbuhan populasi tidak dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat meningkatkan tekanan pada kebutuhan pokok, infrastruktur, dan layanan publik, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi kemiskinan.

Sesuai definisi dari Kementerian Sosial RI (2021:2) “Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu strategi penunjang kesejahteraan masyarakat di Indonesia mencakup pemberian bantuan kepada Keluarga Miskin (KM) yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan resmi terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)” [3]. Program ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 dengan pengawasan dari Kementerian Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan tujuan utama membantu 500.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp 843 juta [4]

Menurut BPS Jawa Timur tahun 2023 Kabupaten Magetan merupakan kabupaten terkecil kedua setelah Kabupaten Sidoarjo dengan luas wilayah 688,84 km² dan terletak di ujung barat Provinsi Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk di Kabupaten Magetan adalah 678,343 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,5 persen pertahun. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut, Kabupaten Magetan dapat dikategorikan padat dengan angka kepadatan penduduk yaitu 984 jiwa per kilometer persegi. Selain itu, angka penduduk miskin menurut BPS Jawa Timur tahun 2023 adalah 62,49 ribu jiwa atau 9,2 persen penduduk dalam kondisi miskin dan 14,000 ribu jiwa diantaranya mengalami kondisi kemiskinan ekstrem. Dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Magetan masih terdapat permasalahan yaitu adanya perbedaan besaran nominal uang bantuan yang diterima penerima PKH yang memperolehnya secara mandiri dibandingkan menerima bantuan dari aparat desa[5]. Selain itu, kurangnya dukungan dari aparat desa seperti tidak adanya sosialisasi atau pendampingan[6]. Sehingga berdampak pada pemahaman masyarakat tentang penggunaan dana PKH, selaras dengan hasil uji kuantitatif dari Direktorat Jenderal

Kemenkeu tahun 2022, yang menghasilkan 26% penerima PKH hanya menggunakan sebagian dana untuk mengakses pendidikan dan kesehatan.

Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kabupaten Magetan yang menerima bantuan sosial dari PKH. Desa ini terdiri dari beberapa dusun, yaitu Ngasem, Tempel, Genjeng, Kedungdowo, Ngrombo dan Tular dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah pertanian dan pengrajin kerupuk beras. Menurut BKKBN tahun 2023, Desa Banjarejo memiliki total penduduk 4.216 jiwa dengan jumlah masyarakat miskin yaitu 1.479 jiwa atau sekitar 35% penduduknya masuk ke dalam kategori masyarakat miskin. Desa ini secara konsisten berusaha agar penduduknya dapat mendapatkan dana bantuan sosial dari PKH. Menurut Dinas Sosial Magetan masyarakat Desa Banjarejo yang menerima bantuan PKH pada tahun 2023 hanya sekitar 170 keluarga, yang berarti masih banyak keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH. Namun beberapa keluarga mampu secara ekonomi diketahui tetap menerima bantuan PKH dikarenakan Perangkat Desa tidak dapat menghapus data dan harus dari Pemerintah Pusat, menjadikan koordinasi dan komunikasi data yang rumit antara penanggung jawab wilayah dengan pemerintah pusat. Menurut Dinas Sosial Magetan pada tahun 2023 belum dapat data terbaru dan masih buta data PKH dikarenakan tidak ada informasi lebih lanjut dari Kementerian Sosial RI [7].

Efektivitas merujuk pada sejauh mana pelaksana berhasil mencapai tujuannya. Ketika pelaksana mencapai tujuan tersebut, ini menandakan bahwa program tersebut telah beroperasi dengan efektif (Mardiasmo, 2019:134)[8]. Selaras menurut Siagian (2019:24) efektivitas dapat dijelaskan sebagai tingkat pencapaian yang menunjukkan seberapa berhasil manajemen program mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal kualitas, jumlah, dan waktu[9]. Menurut Mulyasa (2020:120) pendekatan efektivitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu berjalan efektif. Menurut Sunarti (2019:59-60) bahwa kesejahteraan sosial merujuk pada keadaan dimana kebutuhan materi, spiritual, dan sosial warga negara dipenuhi dengan baik, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri serta menjalankan peran sosialnya. Menurut Fahrudin (2019:8-9) kata kesejahteraan berasal dari kata "sejahtera," yang memiliki akar kata dalam bahasa Sansekerta, yaitu "Catera," yang berarti payung[10]. Setiap orang mempunyai serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan individu (Maslow, 2018:370)[11].

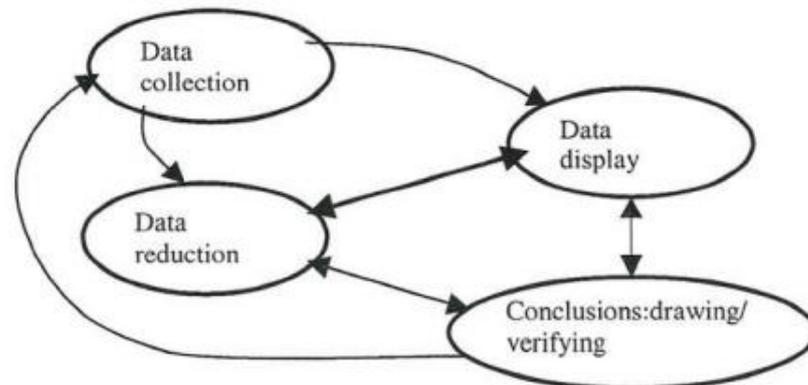
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis data deskriptif dan interpretatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini berupa sumber data primer yakni observasi dan wawancara, serta sumber data sekunder yakni sumber tertulis berupa buku, artikel ilmiah, bahkan arsip, dokumen pribadi dan resmi. Seluruh informasi yang ada di dalam penelitian ini merupakan informasi yang sudah terpilih melalui pertimbangan agar mampu memberikan informasi yang akurat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian di Desa Banjarejo, Kabupaten Magetan dapat disimpulkan bahwa efektivitas PKH belum sepenuhnya sesuai dengan indikator efektivitas menurut Sutrisno (2018) dikarenakan terdapat permasalahan pada indikator pemahaman program [12].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, khususnya memanfaatkan data verbal untuk mengeksplorasi hal-hal konseptual, tanpa memasukkan perhitungan numerik atau pengukuran empiris. Data umumnya disajikan dalam bentuk narasi dan gambar-gambar, dan dapat diperoleh melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial atau gejala alamiah dalam konteks nyata, dengan menggali pemahaman mendalam tentang konsep, proses, dan makna yang terlibat (Sugiyono, 2019:18)[13]. Penelitian ini berfokus pada analisis data deskriptif dan interpretatif, dan tidak berusaha untuk mengukur variabel atau menghasilkan angka-angka yang bersifat umum. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan wawasan mendalam, pemahaman konteks, dan interpretasi yang kaya terkait dengan subjek maupun objek penelitian.

Penelitian ini melakukan pemilihan lokasi untuk memfokuskan cakupan penelitian dengan tujuan mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Desa Banjarejo, Kabupaten Magetan. Pemilihan Desa Banjarejo sebagai tempat penelitian didasarkan pada fakta bahwa desa tersebut dalam tingkat kemiskinan tinggi dengan hanya 170 keluarga miskin yang menerima bantuan PKH dari total 1.479 keluarga miskin. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Februari hingga April 2024. Subyek penelitian ini meliputi Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial Kabupaten Magetan, empat Keluarga Penerima Manfaat PKH Desa Banjarejo, Pendamping PKH Desa Banjarejo, Koordinator PKH Kabupaten Magetan, dan Sekretaris Desa Banjarejo.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, peneliti menyusun alat bantu yang dapat mendukung proses pengumpulan data berupa Pedoman Wawancara, Pedoman Observasi dan Pedoman Dokumentasi. Pada penelitian ini pemeriksaan keabsahan data menggunakan aspek uji kredibilitas dengan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan keabsahan data atau hasil penelitian dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber atau melalui berbagai metode penelitian. Konsep ini, seperti dijelaskan oleh Sugiyono (2019:368) yaitu melibatkan verifikasi data dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai metode dan pada waktu yang berbeda. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi yang diaplikasikan adalah triangulasi sumber, Triangulasi sumber bertujuan untuk membandingkan dan memverifikasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui berbagai waktu dan alat dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019:369). Penelitian ini menggunakan metode analisis pendekatan interaktif yang dirancang oleh Miles dan Huberman (2014:12-14),



Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Sugiyono, 2019:330

Beberapa penelitian terkait PKH pernah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian Nova Abizal & Yulindawati (2022) dengan tentang efektivitas PKH terhadap kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi di Aceh Barat Daya[14]. Kemudian, penelitian oleh Alya Nurhafifa (2022) tentang Efektivitas PKH di Desa Mabonta yang berfokus untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan PKH dan kesejahteraan masyarakat penerima PKH[15].

3. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi data mengenai PKH di Desa Banjarejo berdasarkan indikator efektivitas menurut Sutrisno (2018: 125-126) yaitu sejauh mana sebuah program mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang melibatkan evaluasi dari berbagai aspek seperti pemahaman program oleh pelaksana dan KPM, ketepatan sasaran program, ketepatan waktu pelaksanaan, pencapaian tujuan program, serta dampak nyata yang dihasilkan dalam perubahan kondisi atau situasi yang dituju. Berdasarkan data yang disajikan, berikut adalah deskripsi data sesuai dengan indikator efektivitas PKH di Desa Banjarejo

1.1 Pemahaman Program

Indikator pemahaman program yaitu menyangkut tingkat pemahaman pelaksana dan penerima program mengenai tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari program tersebut. Dalam hasil wawancara dan observasi penelitian, pendamping PKH menjelaskan bahwa mereka telah secara konsisten melakukan sosialisasi kepada KPM sejak awal pertemuan, dimulai dari tahap pertemuan awal hingga validasi data dilakukan. Selain itu, Pendamping PKH juga melaksanakan berbagai program tambahan untuk memperdalam pemahaman KPM tentang PKH seperti sesi edukasi tambahan dan sosialisasi terkait manfaat serta kewajiban dalam program PKH.

Merujuk teori dari Sutrisno (2018:125) pemahaman program yang dimaksud adalah kesuksesan pelaksanaan program tergantung pada sejauh mana pelaksana dan penerima program memahami tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari program tersebut. Pemahaman yang komprehensif tentang program oleh semua pihak yang terlibat menjadi kunci utama untuk menjalankan program secara efektif.

Pertama, peneliti menemukan bahwa beberapa KPM hanya memahami secara dasar mengenai PKH dimana seharusnya para KPM juga memahami terkait secara detail baik itu mekanisme penyaluran maupun tujuannya. *Kedua*, Pendamping PKH merupakan salah satu instrumen penting bagi pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu buku pedoman yang memiliki fungsi Panduan operasional, sumber informasi, alat edukasi, dan mengevaluasi keberhasilan program.

Dari penjelasan diatas terkait kunci utama mengenai pemahaman yang komprehensif tentang PKH oleh semua pihak yang terlibat menjadi kunci utama untuk menjalankan program secara efektif, yaitu KPM serta Pendamping PKH. Dari kedua pihak tersebut dapat ditarik kesimpulan dimana berbagai upaya seperti sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping PKH yang sudah dilakukan secara rutin, masih belum membuahkan hasil yang signifikan berkaitan dengan pemahaman KPM terhadap tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan dari adanya PKH. Dimana masih banyak kesalah pahaman dari KPM tersebut, sehingga sosialisasi terkait PKH dan bentuk-bentuk kegiatan penunjang lainnya yang berkaitan dengan pencapaian tujuan PKH masih perlu ditingkatkan. Hal ini perlu ditingkatkan agar tujuan utama dari PKH bisa tercapai dengan baik, dan bisa dipastikan KPM benar-benar memahami serta menerima manfaat dari bantuan tersebut sehingga dari adanya PKH bisa meningkatkan kualitas hidup dan terciptalah mandiri ekonomi bagi KPM.

1.2 Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merujuk pada ukuran atau petunjuk yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu program atau kegiatan dapat mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan secara tepat. Indikator ini biasanya berhubungan dengan seberapa baik program tersebut dapat mencapai kelompok sasaran yang benar, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kelayakan, relevansi, dan akurasi dalam menentukan siapa yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan manfaat dari program tersebut. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa jika ada penerima bantuan PKH yang mampu tetapi tetap diberikan dan dijadikan KPM dengan masih terdatanya keluarga tersebut. Hal ini disanggah oleh Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial Kabupaten Magetan, dan Koordinator PKH dengan didukung pernyataan dari Pendamping PKH bahwa selalu ada verifikasi, evaluasi dan bisa mengecek secara daring. Selain itu juga terdapat dokumentasi berupa mekanisme calon KPM PKH dari Kemensos RI. Dalam hal ini, untuk mengetahui kebenaran dari pernyataan tersebut peneliti juga melakukan observasi penelitian dengan mengunjungi rumah-rumah KPM secara langsung.

Menurut Sutrisno (2018:125) indikator ketepatan sasaran mengukur efektivitas program dalam mencapai dan memengaruhi target populasi atau masalah yang dituju. Meski tujuan program sudah sangat jelas, terdapat beberapa keluhan dari KPM mengenai ketidaksesuaian data atau penerimaan yang dianggap tidak tepat. Ada kasus-kasus di mana keluarga yang sebenarnya mampu secara finansial masih menerima bantuan, sementara keluarga yang lebih membutuhkan justru terlewatkan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pendataan dan verifikasi penerima bantuan. Salah satu solusi yang diimplementasikan adalah penggunaan teknologi informasi dan database yang terintegrasi. Pemerintah pusat

meluncurkan sistem informasi yang lebih canggih dan database terintegrasi yang dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses verifikasi penerima bantuan. Teknologi ini memungkinkan pendataan yang lebih tepat dan dapat mengurangi risiko kesalahan atau manipulasi data. sistem pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat juga merupakan alat penting dalam memastikan ketepatan sasaran.

Berdasarkan hasil observasi, Pertama, karakteristik penerima bantuan PKH sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Mayoritas anggota PKH yang diwawancara memiliki anak balita dan anak sekolah. Kedua, dari segi tempat tinggal, anggota KPM yang diwawancara memiliki rumah dengan dinding berbahan papan, bahkan ada yang masih belum memiliki rumah secara pribadi. Ketiga, sesuai dengan Permensos No. 1 Tahun 2018 Pasal 35 menyebutkan bahwa menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan pelaksanaan dan evaluasi untuk mengukur kegagalan atau keberhasilan PKH tiap satu tahun sekali.

Ketepatan sasaran PKH bisa kita pahami dan tarik kesimpulan dimana indikator kedua penilaian terkait efektivitas PKH di Desa Banjarejo sudah sesuai dengan karakteristik penerima manfaat PKH menurut pedoman PKH yang ada, akan tetapi masih ditemukan oleh peneliti banyak permasalahan demi permasalahan yang ada dalam menjalankan PKH. Permasalahan tersebut berupa ketidak sesuaian data dan kesulitan administrasi yang dialami oleh KPM, permasalahan yang ada seringkali bersumber dari KPM yang minim akan pemahaman akan penyesuaian data dan administrasi penerima bantuan sosial, terkhusus PKH.

1.3 Ketepatan Waktu

Indikator efektivitas ketepatan waktu program merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu program atau proyek dapat memenuhi jadwal yang telah ditetapkan. Ini mencakup pengaturan jadwal yang jelas, kepatuhan terhadap jadwal, durasi waktu pelaksanaan dibandingkan dengan yang direncanakan, identifikasi dan analisis keterlambatan beserta penyebabnya, kemampuan program dalam merespons perubahan atau masalah yang muncul selama pelaksanaan, serta efisiensi penggunaan waktu untuk mencapai hasil maksimal. Ketepatan waktu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program, baik dalam pencapaian tujuan maupun efisiensi biaya dan sumber daya. Berdasarkan dokumentasi penelitian yang didapat dari Dinas Sosial Kabupaten Magetan mendapati empat tahap penyaluran pada tahun 2023 lalu dan sesuai penuturan dari Koordinator PKH dan Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial Kabupaten Magetan sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan PKH Tahun 2023

Tahap 1	Januari-Maret
Tahap 2	April-Juni
Tahap 3	Juli-September
Tahap 4	Oktober-Desember

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Magetan

Selain itu, hasil dari observasi mendapati bahwa Pendamping PKH juga melakukan pendampingan dengan KPM termasuk pada saat penyaluran dan pengambilan dana bantuan sehingga tahapan dari program tetap sesuai dengan jadwal PKH.

Menurut Sutrisno (2018:126), ketepatan waktu adalah suatu tolak ukur yang mengacu pada kemampuan suatu sistem atau proses untuk menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terkait indikator penilaian efektivitas PKH ketepatan waktu penyaluran PKH di Desa Banjarejo, ketepatan waktu penyaluran bantuan PKH merupakan indikator krusial dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan KPM, bisa kita pahami bahwa penyaluran bantuan sudah sesuai dengan prosedur jadwal yang ditentukan, dimana terdapat 4 tahap penyaluran bantuan dan sudah disalurkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Setiap fase melibatkan serangkaian verifikasi dan evaluasi data untuk memastikan ketepatan sasaran dan kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan. Meskipun terdapat potensi penyesuaian jadwal akibat faktor-faktor seperti penambahan alokasi anggaran, sistem ini dirancang untuk menjamin penyaluran bantuan yang efisien dan tepat sasaran sepanjang tahun, yang pada gilirannya berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan KPM. Ketika terdapat kendala seperti keterlambatan penerimaan bantuan yang dialami oleh KPM merupakan permasalahan yang tidak terduga akan tetapi sudah mendapatkan perhatian oleh Koordinator PKH sehingga dapat teratasi dengan baik, dibuktikan oleh tindakan perbaikan sistem komunikasi agar permasalahan yang dialami KPM terkait keterlambatan penerimaan bantuan PKH bisa langsung teratasi, dan pemberian informasi terkait waktu penyauran bantuan bisa diakses oleh KPM dengan mudah.

1.4 Tercapainya Tujuan Program

Penilaian indikator efektivitas tercapainya program merupakan sejauh mana tujuan dan hasil yang direncanakan dari suatu program telah berhasil dicapai. Ini mencakup beberapa aspek penting seperti pemenuhan target yang telah ditetapkan, dampak positif yang dihasilkan bagi sasaran program, kepuasan penerima manfaat, peningkatan kondisi atau masalah yang ingin diatasi, dan keberlanjutan hasil setelah program berakhir. Indikator ini membantu dalam mengevaluasi apakah program tersebut efektif dalam mencapai tujuan utama dan memberikan. Selain itu, Koordinator dan Pendamping PKH di Desa Banjarejo menegaskan bahwa terdapat enam indikator evaluasi yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan program PKH. Indikator tercapainya tujuan program PKH mencakup enam aspek yang disebut 6T. manfaat yang signifikan bagi KPM Desa Banjarejo. 6T tersebut yaitu Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi.

Merujuk teori dari Sutrisno (2018:126) yaitu merujuk pada pengukuran untuk mengevaluasi sejauh mana suatu program atau inisiatif berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada indikator tercapainya tujuan program, efektivitas PKH di Desa Banjarejo dapat disimpulkan kurang optimal karena masih terdapat sejumlah KPM yang menggunakan dana bantuan untuk membayar hutang. Hal ini menunjukkan adanya deviasi dalam penggunaan dana bantuan yang dapat mengurangi efektivitas program dalam mencapai tujuannya. . Salah satu tujuan utama PKH adalah meningkatkan akses KPM terhadap layanan

kesehatan. Berdasarkan data dan wawancara terkait penyelesaian masalah tercapainya kesehatan yang merata khususnya vaksinasi di Desa Banjarejo, Kabupaten Magetan, dapat disimpulkan bahwa upaya vaksinasi telah diarahkan secara intensif terutama pada masyarakat umum dan lansia. Evaluasi terhadap dampak PKH terhadap bidang kesehatan menunjukkan hasil yang positif. Pencapaian vaksinasi pertama mencapai 92.71% dari target yang ditetapkan, dengan lebih dari 29 juta penerima vaksin.

1.5 Perubahan Nyata

Perubahan nyata PKH merujuk pada ukuran atau metode yang digunakan untuk menilai seberapa baik PKH mencapai tujuan-tujuannya dengan mengidentifikasi dan mengukur perubahan konkret yang terjadi pada kondisi atau situasi yang ingin diperbaiki atau dimajukan oleh program tersebut. Evaluasi terhadap indikator-indikator ini membantu memantau dan menilai dampak positif program dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan KPM PKH. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rukmini selaku KPM PKH serta pernyataan dari Pendamping PKH dan Koordinator PKH, terlihat bahwa program PKH telah memberikan dampak yang signifikan dalam bidang pendidikan. Banyak penerima manfaat yang sekarang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya hingga tingkat SMA, bahkan ada yang melanjutkan ke jenjang kuliah.

Menurut Sutrisno (2018: 126) Indikator perubahan nyata dalam PKH mengacu pada parameter atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dan hasil konkret yang dihasilkan oleh program tersebut terhadap KPM dan masyarakat secara umum. Berdasarkan wawancara dengan para pihak terkait, terlihat bahwa indikator perubahan nyata dari PKH terhadap KPM telah terbukti efektif. Sehingga program ini telah memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi bagi KPM. Secara khusus, terlihat peningkatan akses dan kesadaran akan pentingnya pendidikan, di mana banyak KPM yang sekarang mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga tingkat SMA bahkan kuliah, dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Magetan menunjukkan penurunan jumlah KPM yang masih memenuhi kriteria program dari tahun ke tahun. Penurunan ini mencerminkan upaya program untuk mengurangi ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan sosial dan mendorong kemandirian ekonomi.

Dengan demikian, PKH di Desa Banjarejo dapat dianggap sebagai langkah awal yang positif dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi di tingkat lokal. Namun, program ini perlu terus ditingkatkan dan dimonitor untuk mencapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Upaya peningkatan dan monitoring ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, maupun dengan organisasi lokal.

1.6 Faktor Pendukung dan Penghambat PKH di Desa Banjarejo

a. Faktor Pendukung

- 1) Kesadaran diri KPM tentang tujuan program dan peran aktif mereka dalam menghadiri sosialisasi rutin hal tersebut disampaikan sesuai dengan wawancara kepada salah satu KPM yaitu Ibu Tumisih.

Kesadaran ini sangat penting karena membantu KPM memahami manfaat dan tujuan dari program PKH, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memanfaatkan bantuan yang diterima dengan baik.

- 2) Sosialisasi rutin yang dilakukan oleh pendamping PKH merupakan faktor pendukung penting lainnya. Sosialisasi ini berfungsi sebagai sarana untuk memberikan informasi yang teratur dan akurat kepada KPM tentang prosedur, hak, dan kewajiban mereka dalam program PKH. Melalui sosialisasi rutin, KPM mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan manfaat program, serta cara memanfaatkan bantuan dengan benar.
 - 3) Dukungan dari Kementerian Sosial RI merupakan faktor penting dalam pelaksanaan PKH. Kementerian Sosial RI melalui Kepala Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial Kabupaten Magetan secara aktif memberikan dukungan dalam berbagai aspek pelaksanaan program ini, termasuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan serta membantu proses administrasi bagi anggota KPM PKH, Koordinator PKH, atau Pendamping PKH untuk mempermudah pelaksanaan program.
 - 4) Partisipasi aktif dari komunitas dan adanya solidaritas sosial yang kuat di antara KPM juga mendukung efektivitas PKH. Komunitas yang saling mendukung dan berbagi informasi serta pengalaman akan membantu KPM dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan bantuan secara optimal.
- b. Faktor Penghambat
- 1) masalah data kependudukan yang tidak valid bisa menjadi kendala
 - 2) permasalahan yang terjadi dalam DTKS terkait tidak sinkronnya data, terutama terkait dengan KPM yang sudah "graduasi" dari PKH, namun data mereka masih tetap tercatat dalam DTKS.
 - 3) peran aktif anggota KPM PKH yang tidak sesuai dengan tujuan program
 - 4) masalah terkait dengan rekening, seperti rekening yang bermasalah atau ATM yang terblokir, juga sering terjadi.
 - 5) adanya kecemburuan antar anggota PKH terkait dengan bantuan yang diterima juga bisa menjadi masalah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Efektivitas Program Keluarga Harapan Bagi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin Desa Banjarejo Kabupaten Magetan, PKH memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Banjarejo, Kabupaten Magetan. Akan tetapi dari segi efektivitas berdasarkan hasil penelitian di Desa Banjarejo, Kabupaten Magetan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas PKH masih belum sepenuhnya sesuai dengan indikator efektivitas menurut Sutrisno (2018)

dikarenakan masih adanya satu indikator yang belum tercapai, yaitu pemahaman program. Dimana masih beberapa anggota KPM PKH yang belum memahami terkait PKH. Penilaian terkait efektivitas PKH bisa dinilai melalui indikator-indikator penilaian efektivitas PKH menurut Sutrisno (2018) dimana tingkat pemahaman mengenai tujuan, proses, dan hasil dari PKH masih kurang memadai.

Ketepatan sasaran menunjukkan bahwa PKH di Desa Banjarejo berhasil mencapai kelompok sasaran yang tepat. Ketepatan waktu menunjukkan bahwa penyaluran bantuan PKH kepada para KPM sudah sesuai dengan prosedur penyaluran yang telah ditetapkan walaupun dalam hal ini ditemukan permasalahan terkait ketidakjelasan informasi terkait jadwal penyaluran dan alokasi anggaran. Terkait indikator tercapainya tujuan program, dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan hasil yang positif, dimana PKH berhasil meningkatkan akses pendidikan dan ekonomi bagi KPM, namun dalam pelaksanaan PKH masih ditemukan sejumlah KPM yang menggunakan dana bantuan untuk membayar hutang. Pada indikator perubahan nyata menunjukkan hasil yang positif terkait dampak adanya PKH, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi bagi KPM. Efektivitas Program Keluarga Harapan Bagi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin Kabupaten Magetan, memang memiliki dampak positif, meskipun dari segi efektivitas PKH di Desa Banjarejo, Kabupaten Magetan belum sepenuhnya bisa dikatakan efektif.

Referensi

- [1] A. K. Sen, *Development as Freedom*. New York: Alfred A, 1999.
- [2] Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun - Tabel Statistik," 2023.
- [3] Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. 2021.
- [4] Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, *Kajian Program Keluarga Harapan*. 2015.
- [5] D. D. Kustatiria and I. Prabawati, "Evaluasi Program Keluarga Harapan Kelurahan Bibis Kabupaten Magetan (Studi Pada Aspek Kesejahteraan Sosial)," *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, pp. 2163–2172, 2023.
- [6] R. P. Firlya, *Efektivitas Program Keluarga Harapan untuk Menunjang Kesejahteraan Masyarakat Sukolilo*. Surabaya: UB Surabaya Press.
- [7] Dinsos Magetan, "Dinas Sosial Magetan," Dinas Sosial Magetan.
- [8] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2019*. Bandung: Andi Bandung, 2019.
- [9] Siagian, *Buku Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- [10] A. Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Bandung, 2019.
- [11] A. H. Maslow, *A Theory of Human Motivation*, vol. 50. Originally Published in *Psychological Review*, 1943.
- [12] E. M. Sutrisno, *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenamedia Group., 2018.
- [13] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta Press, 2019.

- [14] N. , M. Abizal and Yulindawati, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya),” *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 1, no. 1, pp. 55–70, 2022.
- [15] A. Nurhafifa, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukolilo,” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.